KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Demokrat ungkap adanya keterlibatan intelijen
Tanggal : Jumat, 17 November 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Demokrat Ungkap Adanya Keterlibatan Intelijen

Badan Intelijen Negara (BIN) masuk bagian yang diawasi Panitia Kerja Netralitas Pemilu di Komisi I DPR.

Sri Utami
Arui@mediaindonesia.com

KETERLIBATAN aparat keamanan dalam setiap pemilu bukan lagi rahasia umum atau jadi isapan jempol. Bila dikritisi lebih dalam, ketidaknetralan pemerintah sudah menjadi sejarah yang tidak tertulis, tapi diingat publik.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Didik Mukrianto dalam rapat kerja DPR dengan Kejaksaan Agung, kemarin.

"Bagaimanapun juga kita punya sejarah kelam, bagaimana kemudian aparat kita ini melibatkan diri atau kemudian tertarik pada politik praktis, termasuk, mohon maaf dengan segala hormat, di lingkungan kejaksaan potensinya ada dan dulu pernah kita rasakan, tapi alhamdulillah sekarang tidak kita rasakan dan kemudian intelijen bergerak dengan cepat," katanya.

Badan intelijen dan aparat penegak hukum memiliki fungsi dan kemampuan yang luar biasa yang akan menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Saya hanya mengingatkan, karena intelijen ini punya fungsi yang sangat luar biasa, intelijen misalkan, Bapak, sudah tidak usah kita pertanyakan, cuma intelijen-intelelijen di bawah ini, kan, banyak sekali, Pak, di kabupaten dan kota ini," cetusnya.

Didik meminta kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menjaga dengan baik netralitas fungsi intelijen, jangan sampai melakukan intervensi atau penetrasi. "Saya mohon dijaga dengan baik. Jangan sampai intelijen justru melakukan intervensi atau penetrasi. Ini bukan di kejaksaan, tapi di lembaga intelijen lain disinyalir di tingkat bawah melakukan hal sama yang sekarang viral."

Jaksa Agung menegaskan komitmen Korps Adhyaksa untuk senantiasa menjunjung tinggi netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. "Kejaksaan akan terus menjunjung tinggi netralitas dalam mendukung, menyukseskan, penyelenggaraan pemilu serentak 2024," kata Burhanuddin.

Ia menambahkan, netralitas dalam perhelatan pesta demokrasi merupakan isu utama yang menjadi perhatian lembaganya. "Netralitas ini justru isu utama sehingga kami serius dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya," ujarnya.

Masuk panja

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) masuk bagian yang diawasi Panitia Kerja (Panja) Netralitas Pemilu. Panja itu dibentuk menyusul pengesahan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR. "(BIN) sudah ada, namanya Panja Netralitas Pemilu," katanya.

Panja Netralitas Pemilu bertugas mengawasi gabungan antarlembaga. Hal itu bentuk persiapan untuk meneguhkan komitmen netralitas lembaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Mitra yang diawasi di Komisi I BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSS), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers," ungkap Hasanuddin.

Ia menambahkan, Panja Netralitas Pemilu dibentuk berdasarkan kesepakatan antarkomisi. Namun, Hasanuddin belum mengungkap ketua panja tersebut. "Kesepakatan komisi jadi ada dua panja," ucap Hasanuddin. (Fah/Ant/P-2)